

**INTERPRETASI HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR PAKSAAN
DAN ANCAMAN YANG MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN PERKAWINAN**

*(Analisis Yuridis Putusan Nomor : 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs jo. Putusan
Nomor: 230/ Pdt. G/2008/ PTA.Sby)*

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FATMAWATI INDRA RUKMANA
NIM. 0910110156



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

**INTERPRETASI HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR PAKSAAN
DAN ANCAMAN YANG MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN PERKAWINAN**

*(Analisis Yuridis Putusan Nomor : 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs jo. Putusan
Nomor: 230/ Pdt. G/2008/ PTA.Sby)*

Fatmawati Indra Rukmana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: fatmafhub@gmail.com

Abstract:

The different legal interpretation of coercion/force/compulsion and unlawful threats make a different verdicts about a case of marriage annulment between Mr.Y and Mrs.X. Law Interpretation of the two elements need to be done right to provide legal certainty. The research was conducted by juridical-normative. The results of this study concluded that the verdict No. 285 / Pdt. G / 2008 / PA / Krs This is in accordance with the substantive civil law and the verdict No. 230 / Pdt. G / 2008 / PTA.Sby not in accordance with the substantive civil law, and it is concluded that the coercion/force/compulsion and the unlawful threat are two different things after doing the interpretation and comparison of the law so there is no confusion anymore to define both the problems that occur in context .

Key Words: Law Interpretation, Coercion, unlawful threats, annulment of marriage

Abstraksi:

Adanya perbedaan interpretasi hukum menentukan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum menyebabkan perbedaan putusan tentang sebuah kasus pembatalan perkawinan antara Y (sebagai suami) dan X (sebagai istri). Interpretasi hukum dalam menentukan kedua unsur tersebut perlu dilakukan secara tepat untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil dan putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA.Sby tidak sesuai dengan hukum perdata materiil, serta diperoleh kesimpulan bahwa antara paksaan dan ancaman yang melanggar hukum merupakan kedua hal yang berbeda setelah dilakukannya interpretasi dan perbandingan hukum sehingga sudah tidak ada kerancuan lagi untuk menentukan keduanya sesuai konteks permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: Interpretasi Hukum, Paksaan, Ancaman Yang Melanggar Hukum, Pembatalan Perkawinan.

PENDAHULUAN

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sangat penting, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, kesukarelaan dan kesepakatan yang akan melahirkan ikatan lahir batin yang menjadi unsur penting timbulnya hubungan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang dipaksakan atau ancaman yang melanggar hukum.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan.³ Unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (1) KHI sedangkan Unsur paksaan diatur dalam pasal 71 huruf (f) KHI.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan unsur paksaan dan adanya ancaman yang melanggar hukum adalah kasus permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan seorang suami yang berkedudukan sebagai pemohon (selanjutnya disebut Y). Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilandasi alasan Pemohon menikahi Termohon yakni istrinya (selanjutnya disebut X) karena dipaksa dan diancam oleh ayah Pemohon (ayah kandung Y). Jika tidak menikahi X yang hamil karena perbuatan Y, maka ayah Y akan memukul dan mengusir Y dari rumah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim yang menangani perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs. Kasus pembatalan perkawinan X dan Y diajukan upaya hukum yakni banding dan mengeluarkan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Putusan tersebut mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh X sekaligus membatalkan

¹ Soedaryo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1. *Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1.

² Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

putusan Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs yang menerima permohonan Y untuk membatalkan perkawinan.

Pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan yakni Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA.Krs, ancaman ayah Y yang merupakan ayah kandung dari termohon termasuk dari kualifikasi dan cakupan dari unsur paksaan itu sendiri. Namun pada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yakni Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby, ancaman tersebut tidak dianggap sebagai paksaan atau ancaman yang melanggar hukum. Hanya dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah untuk menikahkan anaknya. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum. Penemuan hukum ini merupakan kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang – undang bila terjadi peristiwa konkrit.⁴ Oleh karena itu terjadi perbedaan interpretasi hukum majelis hakim dalam menentukan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah kesesuaian dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs dan tidak mengabulkan untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA. Sby tersebut dengan hukum perdata materiil serta interpretasi hukum pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta menurut pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai unsur paksaan serta unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, cetakan kedua, 2005, Hal 168

Krs dan tidak mengabulkan untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA.Sby tersebut dengan hukum perdata materiil serta menginterpretasikan secara tepat pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta menurut pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai unsur paksaan serta unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif.⁵ Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan NOMOR: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs jo putusan Pengadilan NOMOR: 230/ Pdt.G/ 2008/ PTA. Sby yang berkaitan dengan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier terutama berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan pembatalan Perkawinan karena adanya unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Posisi Kasus⁶

Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan telah menjatuhkan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan antara X sebagai Termohon dan Y sebagai Pemohon.

⁵ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295.

⁶ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby jo Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs , 2013.

Adapun identitas Y, seorang laki – laki beragama Islam berusia 24 tahun pada tahun 2008 dan belum memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan X, seorang perempuan berusia 22 Tahun beragama islam pada tahun 2008 dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Y yang terpaksa/terancam untuk menikahi X didasari karena ayah Y mengancam akan memukul dan mengusir jika X yang dalam keadaan hamil tidak dinikahi Y.

Berdasarkan kejadian tersebut, Y mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun pasal yang digunakan untuk dasar pembatalan perkawinan tersebut adalah pasal 71 huruf (f) KHI Jo. Pasal 72 ayat (1) KHI. Kemudian dari hasil pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut adalah putusan Nomor: 285/ Pdt.G/2008/PA/Krs yang mengabulkan permohonan pengajuan pembatalan perkawinan.

Selanjutnya, X merasa tidak puas sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Putusan yang dihasilkan dari proses upaya hakim banding tersebut yakni Putusan Nomor: 230/ Pdt.G/2008/PTA.Sby yang isinya membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan yakni Putusan Nomor 285/ Pdt.G/2008/PA/Krs.

b. Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs dengan Hukum Perdata Materiil

Pada putusan Nomor: 285/Pdt.G/2008/PA Krs tersebut, permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon yakni Y dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun analisis terkait hal ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Majelis hakim sebelum mempertimbangkan dalil – dalil atau alasan – alasan Y sebagai Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan X sebagai Termohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Y dan X. Hubungan hukum antara Y dan X adalah hubungan suami isteri yang sah. Selanjutnya, poin utama suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.⁷ Y dan X keduanya beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah jika

⁷ Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

dilakukan secara tertib menurut hukum syariah.⁸ Pada posisi kasus sudah dijelaskan bahwa identitas Y dan X, keduanya beragama Islam. Perkawinannya pun juga dicatat sebagai perkawinan antara orang Islam. Secara otomatis, perkawinan antara X dan Y dilakukan secara Islam, yakni: Ada calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, ada wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah (ijab dan qabul).⁹

Kedua, pertimbangan hakim yang melandasi dikeluarkannya putusan tersebut adalah: Unsur ancaman dan paksaan yang melandasi terjadinya perkawinan antara Y dan X tidak diketahui oleh X, demikian juga saksi – saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh X. X juga tidak membantah tentang adanya paksaan dan ancaman dalam pernikahannya. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka pemohon/ Kuasanya (dalam perkara ini adalah Y atau kuasa hukum dari Y) tetap dibebani wajib bukti. Hal ini kemudian berkaitan dengan pertimbangan – pertimbangan majelis hakim berikutnya yakni Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Y dan X dilaksanakan di bawah ancaman dan paksaan orang tua Y.

Fokus dalam pengambilan putusan berupa dikabulkannya permohonan Y untuk membatalkan perkawinan antara Y dan X adalah perjanjian atau *aqad* dari perkawinan itu sendiri. Bahwa dari perkawinan memiliki salah satu syarat yaitu menunjukkan adanya kehendak para pihak secara pasti sehingga ijab qabul yang dilaksanakan menjadi sah. Hal ini menunjukkan dipenuhinya syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Uraian dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) KHI tentang unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan dan pasal 71 huruf (f) KHI tentang unsur paksaan sebagai salah satu dasar pembatalan perkawinan.

⁸ Marttiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, 2002, Jakarta: PT Abadi, hal.9

⁹ Abdul Rahman Ghazali, **Fiqh Munakahat**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal 46-49

c. Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby yang Membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs dengan Hukum Perdata Materiil

Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA Sby memiliki perbedaan dengan putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs. Adapun Perbedaan yang mendasar adalah putusan ini tidak membatalkan perkawinan antara Y dan X. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalil- dalil sebagai dasar penguat serta fakta – fakta yang dikemukakan Y maupun kuasa hukumnya dan saksi – saksi yang dihadapkannya bukan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1) KHI. Ada beberapa alasan majelis hakim yang mendasari paksaan dan ancaman yang dimaksud tidak termasuk dalam kualifikasi ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 KHI yaitu:

1. Paksaan dan ancamannya tersebut bukan merupakan ancaman yang membahayakan keselamatan Y karena seorang ayah tidak akan tega untuk mencederai atau mencelakakan anak kandungnya sendiri.
2. Paksaan dan ancaman tersebut hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah terhadap perbuatan anak kandungnya yang telah menghamili X di luar nikah dan juga untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, sehingga ayah Y memaksa agar Y mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan menikahi X.

Ada beberapa hal yang perlu ditanggapi terkait alasan – alasan majelis hakim tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum perdata materiil terutama pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) KHI yakni “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Unsur ancaman yang melanggar hukum tersebut tidak terdapat batasannya, sehingga terdapat interpretasi yang berbeda. Jika hukum yang dimaksud bukan hanya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang berlaku yakni peraturan perundang –

undangan, maka aturan norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga termasuk dari kualifikasi ketentuan ini.

Pada perkara ini, Y sudah jelas diancam akan dipukul ayahnya dan diusir dari rumah jika dia tidak menikahi X. Ancaman pemukulan ini termasuk dalam kualifikasi tindak pidana penganiyaan yakni pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman kekerasan dengan pemukulan oleh ayah dari Y tersebut tidak ada pengecualiannya, termasuk demi menjaga nama baik keluarga. Selain itu, alasan majelis hakim yang menyatakan seorang ayah tidak akan tega untuk mencederai atau mencelakakan anak kandungnya sendiri juga tidak termasuk alasan yang memperbolehkan adanya ancaman sebagaimana yang dimaksud. Bahwa ancaman pemukulan bisa saja dilakukan oleh siapapun, termasuk seorang ayah kepada anaknya sendiri.

Pada perkara ini, ayah Y juga mengancam akan mengusir Y jika ia tidak menikahi X. Hal ini tentu berlawanan dengan norma agama maupun norma kesusilaan. Dalam agama apapun, khususnya Islam, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan serta merawat anaknya dengan baik sebagai karunia dan amanah dari Allah. Ditinjau dari norma kesusilaan, maka tentu ancaman mengusir anak adalah hal yang bertentangan dengan hati nurani karena bagaimanapun perbuatan mengusir apalagi mengusir anak kandung sendiri merupakan perbuatan yang tercela dan dianggap seperti itu secara universal oleh semua orang.

Kedua, Meninjau pada hakekat perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami istri) untuk melangsungkan perkawinan. Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, berarti mereka telah dilandasi oleh/atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini karena pelaksanaan perkawinan mereka tersebut tidak dengan serta merta, tiba – tiba / mendadak, melalui proses yang sangat panjang yakni mereka sudah berpacaran sejak sekolah.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dimaksud disini, dapat ditarik benang merah antara proses pra-pernikahan dengan perkawinan yang didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami istri) untuk melangsungkan perkawinan. Ikatan lahir batin sebagai unsur dari dasar perkawinan dapat diwujudkan dengan adanya perjanjian kedua calon mempelai.

Persetujuan secara sukarela ini sesungguhnya tampak pada saat diadakannya peminangan atau pelamaran terlebih dahulu oleh calon mempelai laki – laki terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.¹⁰ Pada Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹

Proses pra-nikah ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan kasus Y dan X, maka keduanya sebelum menikah melewati suatu proses untuk menimbulkan ikatan lahir batin. Proses ini walaupun tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkawinan, namun diatur dalam hukum Islam dan KHI adalah proses *ta'aruf* dan *khitbah* atau peminangan. Bukan seperti pendapat majelis hakim yang menjadi salah satu pertimbangan hukum yaitu: bahwa proses yang sangat panjang bagi Y dan X untuk pelaksanaan perkawinan yakni saudara X dan saudari Y sudah berpacaran sejak sekolah.

Berdasarkan paparan beberapa hal penting yang terdapat dalam putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi Agama tersebut, majelis hakim kurang cermat dalam memperhatikan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1) KHI dan pasal – pasal lain yang berhubungan karena lebih mempertimbangkan ketentuan non hukum (dalam hal ini adalah moral).

d. Interpretasi Hukum Unsur Paksaan serta Unsur Ancaman yang Melanggar Hukum sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan

1. Interpretasi Gramatikal atau Bahasa

Interpretasi (penafsiran) ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata – kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum, dengan memperhatikan apakah kata – kata itu kata kerja, kata sifat atau keadaan, kata ganti, ataukah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan dan sebagainya.¹²

¹⁰ Soemiyati., *op. cit.*, hal 5

¹¹ Ketentuan pasal 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

¹² Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hal 22.

Paksaan

Pengertian Paksaan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Terdapat tiga pengertian yaitu:¹³

1. Kekerasan; dengan keharusan (yang tidak harus dikerjakan), mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa; menyuruh orang dengan kekerasan. Dengan begitu paksaan adalah apa yang dipaksakan.
2. paksa: waktu, saat, kesempatan.
3. paksa: sayap; sisi misal sisi sebelah bangunan atau gedung.

Sedangkan paksaan dalam Kata paksaan sendiri dalam terjemahan menurut Bahasa Inggris memiliki beberapa sinonim kata yang sama yakni *coercion*, *compulsion*, *force*, *constraint*, *forcing* dan *enforcement*. Namun dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, hanya ditemukan pengertian *coercion*, *force* dan *compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum.

Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).¹⁴ Sedangkan J. Satrio menyatakan, paksaan disini (pasal 1323 KUHPdata) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/ bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.¹⁵

Ahli hukum menjelaskan pengertian paksaan dengan membaginya secara umum menjadi 3 (tiga). Hal ini berkaitan dengan daya paksa yang merupakan lingkup dari bidang hukum pidana. Dijelaskan daya paksa terdiri dari tiga bentuk yaitu:¹⁶

1. Paksaan Mutlak

Dalam hal ini siterpaksa (petindak) tidak dapat bertindak lain, selain daripada apa yang dipaksakan kepadanya. Bagi si terpaksa tiada persoalan pilihan.

2. Paksaan relatif

Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Jika siterpaksa melakukan kehendak

¹³ J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, 2001, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 981.

¹⁴ Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 1987, Cetakan ke XII, hal.23.

¹⁵ J.Satrio, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.246.

¹⁶ E.Y Kanter, S.R Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Jakarta, Stora Grafika, 2002, Hal 273-276

sendiri, ia akan mendapatkan perlakuan yang merugikan dirinya yang tidak dapat dihindarinya.

3. Keadaan darurat

Paksaan ini berasal dari kejadian darurat yang disebabkan oleh bukan manusia.

Ancaman yang Melanggar Hukum

Interpretasi secara gramatikal unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai salah satu dasar pembatalan perkawinan dengan cara memisahkan frase ancaman dan yang melanggar hukum. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, ancaman memiliki dua pengertian yaitu:

1. sesuatu yang mengancam seperti bahaya, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Mengancam memiliki dua pengertian, yaitu:
 - a. menakut – nakuti (dengan senjata).
 - b. (sesuatu yang) dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian, malapetaka.
2. peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana.

Pada sistem hukum di Indonesia, ancaman menjadi salah satu delik dalam hukum pidana. Ancaman menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Disini bukan kebebasan untuk berbuat, tetapi ketenangan, perasaan aman, yang digelar. Ancaman ditujukan kepada kemerdekaan individu bukan karena kemerdekaan itu telah dirintangi. Niat pembuat untuk merealisasikan ancamannya perlu nyata. Namun dalam hal ini tidak mensyaratkan ancaman itu benar – benar dapat dilaksanakan.¹⁷

Sedangkan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab kajian pustaka diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut: Adapun unsur perbuatan yang melanggar hukum antara lain:¹⁸

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

¹⁷ Andi Hamzah, **Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 42.

¹⁸ Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**, Bandung, PT Citra Aitya Bakti, 2002, Hal 11.

2. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang – undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Sedangkan Interpretasi ekstentif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas – batas hasil interpretasi gramatikal. Metode yang tepat dipakai dalam perkara ini adalah metode interpretasi restriktif. Berdasarkan metode interpretasi restriktif dalam merumuskan unsur paksaan dalam perkara pembatalan perkawinan, maka dapat dibatasi pengertian paksaan dalam kasus pembatalan perkawinan antara Y dan X sebagai berikut: **Paksaan** adalah kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan diarahkan terhadap seseorang atau sesuatu yang mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa. Sehingga pada kasus pembatalan perkawinan Y dan X, paksaan terpenuhi karena ada upaya berupa ancaman.

Unsur **Ancaman yang Melanggar Hukum** juga memiliki beberapa pengertian. Berdasarkan beberapa pengertian yang didapat dengan menggunakan interpretasi gramatikal, maka **ancaman yang melanggar hukum** dalam kasus ini adalah sebuah peringatan keras yang merupakan pernyataan niat untuk menimbulkan kerugian khususnya dalam hal ini adalah mengurangi kebebasan seseorang dan memenuhi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Jika dikaitkan dengan ancaman yang melanggar hukum maka, ancaman ini harus memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Namun, dalam hal ini, ancaman yang melanggar hukum masih sebatas niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum haruslah merupakan suatu perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 1365 KUHPerdara.

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang – undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang – undangan. Jadi, perundang –

undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.

Intepretasi sistematis dapat kita awali dengan melihat dari hakikat perkawinan itu sendiri terlebih dahulu. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan ini dapat terjadi karena adanya *aqad*, yang berarti perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.¹⁹ Konsep *aqad* dalam perkawinan tentu berbeda dengan konsep perjanjian pada umumnya. Persetujuan atau perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:²⁰

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum – hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas – batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Sebagaimana pada umumnya suatu perjanjian, perkawinan juga memiliki prinsip kesukarelaan dari kedua belah pihak yakni calon mempelai. Prinsip kesukarelaan disini mengandung maksud bahwa kedua belah pihak yakni suami dan isteri tidak ada unsur keterpaksaan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang – undang Tentang Hak Asasi Manusia. Selain tidak ada paksaan, juga harus adanya pemberian kehendak bebas untuk menandakan kesukarelaan tersebut. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, kebebasan kehendak tidak

¹⁹ Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 63.

²⁰ Soemiyati, *op.cit.*, hal.10.

dijelaskan secara eksplisit. Hal ini terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada kasus perkawinan Y dan X, persetujuan melangsungkan perkawinan tidak bebas dari unsur ancaman yang berupa ancaman pemukulan dari ayah Y terhadap Y. Sehingga nampak pada kasus ini, bahwa perkawinan X dan Y dapat dibatalkan.

4. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Metode interpretasi selanjutnya adalah Interpretasi Teleologis atau Sosiologis. Hal ini diperlukan karena dalam mencapai suatu keadilan, bukan hanya ditinjau dari segi hukum yang mengaturnya, namun dari segi non – hukum yang mempengaruhi keberlakuan hukum aturan hukum tersebut. Interpretasi ini terjadi apabila makna undang – undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.²¹ Pada kasus pembatalan perkawinan Y dan X, Pertimbangan – pertimbangan hukum yang ada dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait kasus ini, lebih mengarah pada interpretasi Teleologis atau sosiologis dalam menafsirkan unsur paksaan maupun ancaman yang melanggar hukum. Hal ini dapat dilakukan oleh majelis hakim untuk mencari keadilan dan menghindari preseden yang buruk jika perkawinan Y dan X dikabulkan pembatalannya.

5. Perbandingan Unsur Paksaan dan Unsur Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan

Setelah melakukan proses interpretasi hukum, terdapat suatu proses perbandingan hukum. Membandingkan sebagai proses mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih.²² Adapun Persamaan unsur paksaan dan unsur ancaman yang melanggar hukum antara lain:

1. Sebagai salah satu dasar pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia

²¹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.61.

²² Soenarjati, dalam R.Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Cetakan kelima, hal.33.

2. Sebagai unsur yang dapat membatalkan terpenuhinya salah satu syarat materiil perkawinan yakni perkawinan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai.
3. Kedudukan ancaman yang melanggar hukum identik sama dengan paksaan relatif yang merupakan salah satu dari jenis paksaan, dalam hal:
 1. Masih memberikan alternatif bagi si terpaksa/ si terancam untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang diinginkan oleh si pemaksa/si pengancam.
 2. Memberikan akibat psikis dari ancaman/paksaan relatif tersebut.

Berdasarkan proses interpretasi hukum, maka ditemukan perbedaan - perbedaan unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Unsur Paksaan dan Unsur Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan

No.	Pembeda	Paksaan	Ancaman yang Melanggar Hukum
1.	Regulasi	Diatur dalam pasal 71 huruf (f) KHI.	Diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada undang – undang nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 27 ayat (1), dan dalam KHI diatur dalam pasal 72 ayat (1).
2.	Unsur – unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu perbuatan 2. Berupa kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan. 3. Ditujukan kepada orang atau sesuatu 4. Tujuannya agar si terpaksa menuruti keinginan si pemaksa sehingga bertentangan dengan kesukarelaan maupun kemerdekaan si terpaksa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebuah tekanan psikis 2. Berupa peringatan keras yang merupakan pernyataan niat 3. Ditujukan pada orang lain 4. Tujuannya merugikan orang lain termasuk hal ini adalah mengurangi kemerdekaan individu 5. Menimbulkan

		<p>5. Kemerdekaan berhubungan dengan kebebasan berbuat</p> <p>6. Ada 3 jenis paksaan jika berhubungan dengan kuasa si terpaksa dalam melakukan perbuatan yang dipaksa.</p>	<p>perasaan tidak tenang dan tidak aman.</p> <p>6. Tidak disyaratkan terjadinya niat dalam suatu perbuatan, niat hanya perlu disampaikan</p> <p>7. Memenuhi kriteria atau unsur perbuatan yang melanggar hukum</p>
3.	Ruang Lingkup	Unsur paksaan bisa dilakukan dengan cara kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan fisik (ancaman psikis).	<p>unsur ancaman hanya berupa kekerasan psikis. Unsur ancaman masih berupa bahaya yang mengancam dan peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana. Hal ini dapat berarti bahwa ancaman bisa dilakukan tanpa kekerasan fisik, namun maksudnya dapat tersampaikan kepada orang yang diancam. Selain itu, unsur ancaman dalam hal pembatalan perkawinan ini memiliki frase sebagai ancaman yang melanggar hukum, jadi hanya ancaman yang memenuhi kriteria sebagai sesuatu yang melanggar hukum yang dimaksudkan.</p>
4	Kuasa Pihak yang Terpaksa/ yang Terancam Untuk Berbuat Sesuai	Pada unsur paksaan, ada kalanya si terpaksa tidak memiliki kekuasaan untuk	Pada unsur ancaman yang melanggar hukum, si terancam memiliki alternatif

	Kehendak	berbuat sesuai kehendak, tetapi pada keadaan tertentu, bisa memiliki untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dipaksakan.	untuk tidak menjalankan perbuatan yang diinginkan si pengancam namun jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian.
--	----------	--	---

PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs telah sesuai dengan maksud dari ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI dikaitkan dengan hakikat perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2008/ PTA. Sby yang membatalkan Putusan Nomor : 285/ Pdt. G/2008/PA/Krs tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI. Hal ini disebabkan pertimbangan hukum yang dikemukakan kurang memiliki keterkaitan yang jelas dengan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 ayat (1) KHI dan pasal – pasal lainnya yang

berhubungan dengan pembatalan perkawinan ini karena lebih bersifat pertimbangan non hukum (moral).

3. Berdasarkan interpretasi hukum yang dilakukan dengan berbagai jenis metode yang dipakai kemudian dilakukan perbandingan hukum, maka unsur paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan merupakan dua hal yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. 2010. **Fiqh Munakahat. Jakarta.** Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2009. **Delik – Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP.** Jakarta. Sinar Grafika.
- E.Y Kanter, S.R Sianturi. 2002. **Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.** Jakarta. Stora Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 1992. **Bahasa Hukum Indonesia.** Bandung. Penerbit Alumni.
- J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain. 2001. **Kamus Umum Bahasa Indonesia.** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J. Satrio. 1992. **Hukum Perjanjian. Bandung.** Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Johny Ibrahim. 2006. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.** Surabaya. Banyumedia Publishing.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. **Hukum Perkawinan Indonesia.** Jakarta: PT Abadi.
- Munir Fuady. 2002. **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,** Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso. 2003. **Perbandingan Hukum Perdata,** Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayuti Thalib. 1974. **Hukum Kekeluargaan Indonesia.** Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soedaryo Soimin. 2004. **Hukum Orang dan Keluarga perspektif Hukum Perdat Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat.** Jakarta. Sinar Grafika.

Soemiyati. 1982. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan**. Yogyakarta.Liberti.

Subekti. 1987. **Hukum Perjanjian**. Jakarta. PT Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2005. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Cetakan kedua. Yogyakarta. Liberty

Data Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Herziene Indonesische Reglement (HIR)

Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991